

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017)

Mega Ajeng Kartikasari, Abdul Rohman¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research is aimed to empirically examine the relation between regional income per capita, gross domestic product of region, general allocation fund, local revenue, financial independence ratio, and allocation of capital expenditure. The dependent variable in this research is allocation of capital expenditure. The independent variables in this research are regional income per capita, gross domestic product of region, general allocation fund, local revenue and financial independence ratio.

The sample of this research consist of 35 Regency/Municipality in the Province of Central Java in the period 2015-2017. This research use quantitative method by using report data realization of local budget revenues and expenditures (APBD) and also the tables of gross domestic product of region (PDRB) Regency/Municipality in the Province of Central Java. The analytical method that was used is multiple linear regression analysis.

The results of this research shows that the variables of regional income per capita, general allocation fund, and local revenue have significant effect on the allocation of capital expenditure. It means that, in determining the amount of income allocated for capital expenditure, local governments should consider regional income per capita, general allocation fund, and local revenue. While the variables of gross domestic product of region and financial independence ratio do not have significant effect on the allocation of capital expenditure.

Keywords : Allocation of capital expenditure, regional income per capita, gross domestic product of region (GDP), general allocation fund (DAU), local revenue (PAD), financial independence ratio, regional financial performance, economic growth.

PENDAHULUAN

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah digunakan sebagai landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di sektor publik, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi belanja modal. Salah satu isu yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah permasalahan alokasi anggaran. Isu ini muncul dari pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal yang berakibat pada rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja ke daerah, ditunjukkan dengan angka alokasi belanja modal yang masih di bawah target rata-rata nasional (RPJM, 2014).

Belanja modal merupakan angka yang memberikan gambaran terkait upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pembangunan daerah yang optimal dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan dengan meningkatnya nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan alokasi belanja modal guna menambah dan memperbaiki infrastruktur agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

¹ Corresponding author

Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik memicu terjadinya peningkatan terhadap pendapatan regional perkapita (Harianto & Hari Adi, 2007). Meningkatnya pendapatan regional perkapita dalam suatu daerah mencerminkan adanya peningkatan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan meningkatnya taraf kesejahteraan dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah, karena memberikan pemasukan pada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak dan retribusi daerah. Kontribusi dari pendapatan regional perkapita yang tinggi dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengurangi subsidi dan mengalokasikan dana untuk belanja modal yang lebih tinggi.

Sumber dana pengalokasian belanja modal dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tingginya PAD suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan pemerintahannya, yang berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah dengan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah (DJPk RI, 2017). Pengalokasian DAU diserahkan dalam bentuk block grant, yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan dana. Pada dasarnya DAU seharusnya dipergunakan untuk belanja modal guna pembangunan daerah, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk belanja modal yang bisa menggerakkan perekonomian daerah.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah, karena hampir seluruh kegiatan pemerintah di daerah memerlukan biaya. Berdasarkan fakta tersebut, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya (Lubis & Hafni, 2013). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam APBD dan dapat diukur dengan analisis rasio keuangan. Salah satu jenis rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2007). Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap kemajuan suatu daerah (Jayanti dkk., 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan informasi dan pertimbangan mengenai manajemen APBD yang efektif dan efisien, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan kebutuhan publik, seperti fasilitas infrastruktur, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di jajaran pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengalokasian belanja modal.

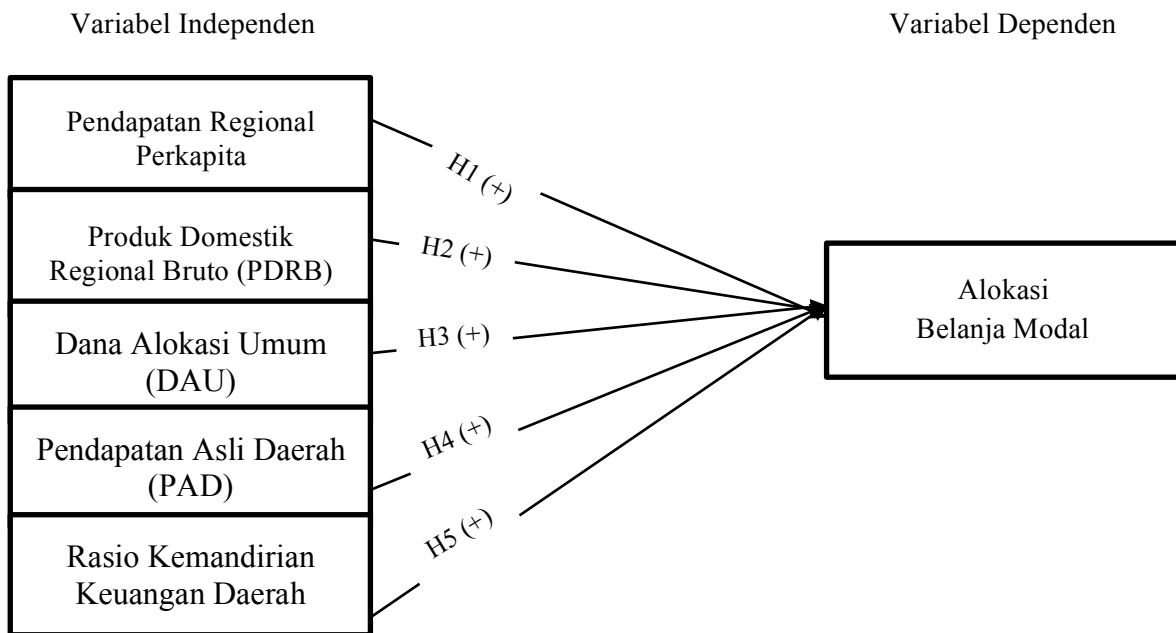
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Landasan teori dalam penelitian ini adalah teori agensi. Jensen and Meckling (1976) merumuskan teori agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang kepada agen sebagai pengambil keputusan. Teori ini menunjukkan adanya konflik antara agen dan prinsipal. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara

agen dan prinsipal, yang mampu mengakibatkan timbulnya perilaku oportunistik agen yang dapat merugikan prinsipal.

Penelitian ini memeriksa pengaruh pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh Pendapatan Regional Perkapita terhadap Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah memicu terjadinya peningkatan terhadap pendapatan regional perkapita (Harianto & Hari Adi, 2007). Meningkatnya pendapatan regional perkapita dalam suatu daerah mencerminkan adanya peningkatan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan meningkatnya taraf kesejahteraan dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah, karena memberikan pemasukan pada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak dan retribusi daerah. Hubungan keagenan dalam konteks pendapatan regional perkapita dapat dilihat dari tanggung jawab pemerintah daerah (agen) kepada masyarakat (prinsipal) yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik melalui alokasi belanja modal.

Kontribusi dari pendapatan regional perkapita yang tinggi dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengurangi subsidi dan mengalokasikan dana untuk belanja modal yang lebih tinggi. Dengan alokasi belanja modal yang lebih tinggi maka pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan publik yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. Penelitian dari Nurlis (2016) membuktikan bahwa pendapatan regional perkapita suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dapat disusun sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan regional perkapita berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan angka yang menunjukkan proses peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah dalam periode satu tahun (Bank Indonesia, 2015). Berdasarkan teori keagenan, hubungan keagenan yang terjadi dalam konteks pertumbuhan ekonomi dilihat dari peran masyarakat sebagai prinsipal

yang merupakan objek pengukuran dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sedangkan peran pemerintah daerah sebagai agen adalah bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara pemberian pelayanan publik yang baik dan memadai melalui pengalokasian belanja modal. Pemberian pelayanan publik yang baik dilakukan melalui pengalokasian belanja modal dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana daerah yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan dana dari pengalokasian belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan investasi modal yang membuat pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal (Indarti & Sugiartiana, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2016) menyatakan bahwa PDRB suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan penelitian dari Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, tergantung pada kondisi tiap-tiap daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₂ : Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut teori keagenan, hubungan keagenan dalam konteks DAU dapat dilihat dari peran masyarakat sebagai prinsipal dan peran pemerintah daerah sebagai agen dalam suatu daerah. Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen menunjukkan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kaitannya dengan DAU merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah berupa transfer yang cukup signifikan di dalam APBN mengakibatkan pemerintah daerah dapat secara leluasa menggunakan DAU (DJP RI, 2017). Dana tersebut dapat digunakan untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat atau dapat disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak penting. Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013) dan Yovita (2011) mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Di sisi lain, penelitian Nurlis (2016) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dari uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal

Pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi yang merupakan kewenangan milik pemerintah daerah, sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Hubungan keagenan dalam PAD dapat dilihat dari tanggung jawab pemerintah daerah (agen) dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (prinsipal) dan memajukan perekonomian daerah melalui alokasi belanja modal. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai bagi daerah dan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Terdapat hubungan antara PAD dengan belanja modal, namun tidak semua daerah dengan pendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Rochmatullah dkk. (2016) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan Meilya dkk. (2018), yang mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi

PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi juga pendapatan yang dialokasikan untuk belanja modal. Di sisi lain, penelitian Nurlis (2016) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan (Fitri dkk., 2013). PAD digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Hubungan keagenan dalam konteks kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah (agen) dalam melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada pusat dan masyarakat (prinsipal) untuk mengelola keuangan daerah dengan baik, serta sumber daya dan potensi daerah melalui alokasi belanja modal agar dapat meningkatkan investasi pada sektor produktif dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan mempunyai pengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Jayanti dkk., 2014).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri dkk. (2013) dan Huda dkk. (2015) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Berbeda dengan penelitian Hidayat (2013) dan Sularso dan Restianto (2011) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Alokasi Belanja Modal

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal pada Pemerintahan Daerah. SAP PP No. 71 (2010) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal ditujukan untuk mengakuisisi tanah, bangunan, peralatan, infrastruktur dan aset tetap lainnya untuk kegiatan kemasyarakatan (Permendagri No. 13, 2006). Indikator pengukuran variabel alokasi belanja modal berdasarkan penelitian dari Huda dkk. (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Regional Perkapita

Pendapatan regional perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu daerah. Pendapatan perkapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pendapatan regional perkapita merupakan pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan pendapatan regional perkapita sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Regional Perkapita} = \frac{\text{Total PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto merupakan salah satu ukuran kuantitas yang diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan pembangunan ekonomi suatu daerah pada masa lampau, masa kini, dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang. Angka-angka PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang banyak digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional. Berdasarkan penelitian dari Yovita (2011) pertumbuhan ekonomi diprosikan dengan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan skala rasio sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum merupakan transfer dana yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. DAU dialokasikan untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU untuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celaah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celaah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal Daerah}$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD sendiri komponennya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil usaha BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. Perhitungan PAD berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Rasio kemandirian merupakan gambaran akan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan (Halim, 2007) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2015-2017, sehingga jumlah data yang akan diolah dalam studi keseluruhan adalah 105 sampel.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan oleh BPK RI dalam situs resminya <http://www.bpk.go.id>. Dari LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 ini diperoleh data realisasi belanja modal, realisasi DAU, realisasi PAD, dan realisasi bantuan transfer pemerintah pusat/provinsi. Sedangkan untuk data kependudukan berupa jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji lima hipotesis yang ada di dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Persamaan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (\text{PRP}) + \beta_2 (\text{PDRB}) + \beta_3 (\text{DAU}) + \beta_4 (\text{PAD}) + \beta_5 (\text{RKKD}) + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Alokasi Belanja Modal
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- PRP = Pendapatan regional perkapita
- PDRB = Produk domestik regional bruto
- DAU = Dana alokasi umum
- PAD = Pendapatan asli daerah
- RKKD = Rasio kemandirian keuangan daerah
- ε = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data penelitian yang digunakan adalah selama periode 2015 hingga 2017. Dengan menggunakan data *pooled cross section*, maka diperoleh sebanyak $35 \times 3 = 105$ sampel. Rincian objek penelitian ada pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Objek Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Banjarnegara
2	Kabupaten Banyumas
3	Kabupaten Batang
4	Kabupaten Blora
5	Kabupaten Boyolali
6	Kabupaten Brebes
7	Kabupaten Cilacap
8	Kabupaten Demak
9	Kabupaten Grobogan

No	Kabupaten/Kota
10	Kabupaten Jepara
11	Kabupaten Karanganyar
12	Kabupaten Kebumen
13	Kabupaten Kendal
14	Kabupaten Klaten
15	Kabupaten Kudus
16	Kabupaten Magelang
17	Kabupaten Pati
18	Kabupaten Pekalongan
19	Kabupaten Pemalang
20	Kabupaten Purbalingga
21	Kabupaten Purworejo
22	Kabupaten Rembang
23	Kabupaten Semarang
24	Kabupaten Sragen
25	Kabupaten Sukoharjo
26	Kabupaten Tegal
27	Kabupaten Temanggung
28	Kabupaten Wonogiri
29	Kabupaten Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian akan disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ABM	105	0,139	0,334	0,213	0,041
PRP	105	11.387.520	80.623.403	25.860.336,771	16.470.795,078
PDRB	105	0,020	0,240	0,054	0,020
DAU	105	400.176.755.000	1.398.539.653.000	929.132.392.693,257	254.556.170.455,716
PAD	105	112.383.412.989	1.791.874.833.769	334.335.630.914,701	228.292.027.305,205
RK	105	0,100	0,820	0,223	0,120

Sumber: Output SPSS, data sekunder yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 2, hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa total sampel (N) dalam penelitian berjumlah 105. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dependen ABM memiliki nilai rata-rata sebesar 0,213 dan nilai standar deviasi sebesar 0,041. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum ABM sebesar 0,334 yaitu pada Kab. Kudus di tahun 2016, dan nilai minimum ABM sebesar 0,139 yaitu pada Kab. Klaten di tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu PRP, PDRB, DAU, PAD dan RK. Variabel independen PRP memiliki nilai rata-rata sebesar 25.860.336,771 dan nilai standar deviasi sebesar 16.470.795,078. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum sebesar 80.623.403 yaitu pada Kab. Kudus di tahun 2017, dan nilai minimum sebesar 11.387.520 yaitu pada Kab. Pemalang di tahun 2015.

Variabel independen PDRB memiliki nilai rata-rata 0,054 dan nilai standar deviasi sebesar 0,020. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum sebesar 0,240 yaitu pada Kab. Blora di tahun 2016, dan nilai minimum sebesar 0,020 yaitu pada Kab. Cilacap di tahun 2017.

Variabel independen DAU memiliki nilai rata-rata sebesar 929.132.392.693,257 dan nilai standar deviasinya sebesar 254.556.170.455,716. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum sebesar 1.398.539.653.000 yaitu pada Kab. Banyumas di tahun 2016, dan nilai minimum sebesar 400.176.755.000 yaitu pada Kota Salatiga di tahun 2015.

Variabel independen PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 334.335.630.914,701 dan nilai standar deviasi sebesar 228.292.027.305,205. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum sebesar 1.791.874.833.769 yaitu pada Kota Semarang di tahun 2017, dan untuk nilai minimum sebesar 112.383.412.989 yaitu pada Kab. Batang di tahun 2017.

Variabel independen RK memiliki nilai rata-rata sebesar 0,223 dan nilai standar deviasi sebesar 0,120. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum sebesar 0,820 yaitu pada Kota Semarang di tahun 2017, dan untuk nilai minimum sebesar 0,100 yaitu pada Kab. Klaten di tahun 2015.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,759 untuk masing-masing model regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dikarenakan nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05.
2. Uji multikolonieritas menunjukkan nilai toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF dibawah 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
3. Uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa persebaran titik-titik pada grafik tidak menunjukkan adanya pola atau bentuk tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk penelitian.
4. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji *durbin-watson* menunjukkan nilai DW sebesar 2,165. Dengan jumlah sampel 105 (n) dan jumlah variabel independen 5 (k=5) diperoleh $du=1,7827$. Nilai DW sebesar 2,165 menunjukkan bahwa DW lebih besar dari batas atas (du) 1,7827 dan kurang dari $4 - 1,7827$ ($4 - du$), maka inferensi yang diambil adalah model regresi tidak terdapat autokorelasi dan uji regresi dapat dilanjutkan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian menggunakan uji regresi berganda. Hasil uji yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Arah	B	Signifikansi	Kesimpulan
H1	+	8,380E-10	0,007	Diterima
H2	-	-0,012	0,950	Ditolak
H3	-	-4,739E-14	0,033	Ditolak
H4	+	6,838E-14	0,044	Diterima
H5	-	-0,100	0,128	Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas, apabila nilai probabilitas menunjukkan angka kurang dari 0,05 (5%), maka hasil uji regresi dapat dikatakan mendukung hipotesis penelitian. Hasil uji statistik f menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang berarti seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan mempengaruhi variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi pada uji regresi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,135 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 13,5%.

Interprestasi Hasil

Hipotesis 1

Hipotesis pertama penelitian adalah pendapatan regional perkapita berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar 8,380E-10 dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan regional perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang artinya hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurlis (2016) dimana pendapatan regional perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian Nurlis (2016) menyatakan bahwa, "Pendapatan regional perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat yang apabila semakin tinggi, maka dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengurangi subsidi dan mengalokasikan dana untuk belanja modal yang lebih tinggi". Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan tingkat pendapatan regional perkapita yang tinggi cenderung memiliki tingkat alokasi belanja modal yang tinggi pula. Contohnya pada Kota Semarang pendapatan regional perkapita di tahun 2015 sebesar 64.140.728 dengan tingkat alokasi belanja modal tahun 2015 sebesar 0,227. Lalu terdapat peningkatan pada pendapatan regional perkapita di tahun 2016 sebesar 66.789.986 yang diikuti dengan meningkatnya juga alokasi belanja modal tahun 2016 sebesar 0,261. Begitu pula di tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan pada pendapatan regional perkapita di Kota Semarang sebesar 69.409.690 dan alokasi belanja modal sebesar 0,295.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua penelitian adalah produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar -0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,95. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang artinya hipotesis ini ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Darwanto dan Yustikasari (2007) dimana PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dalam penelitiannya Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa, "Hal ini terjadi karena dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan selalu diikuti dengan peningkatan pengalokasian dana untuk belanja modal". Hal ini berarti meskipun PDRB mengalami peningkatan yang berdampak pada pendapatan regional perkapita, produktivitas dan peningkatan PAD, namun tidak memiliki peran yang signifikan dalam realisasi anggaran belanja modal di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada data PDRB di BPS Jawa Tengah periode 2015-2017 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan sekaligus penurunan setiap tahunnya,

contohnya pada Kabupaten Semarang tingkat pertumbuhan PDRB tahun 2015 sebesar 0,06 sedangkan alokasi belanja modal tahun 2015 sebesar 0,153. Pertumbuhan PDRB di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,05 sedangkan alokasi belanja modal tahun 2016 meningkat menjadi 0,221 dan di tahun 2017 pertumbuhan PDRB sebesar 0,05 sedangkan alokasi belanja modal di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,199.

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga penelitian adalah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar $-4,739E-14$ dan nilai signifikansi sebesar 0,033. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara signifikan dengan arah hubungan yang negatif terhadap alokasi belanja modal, yang artinya hipotesis ini ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Yovita (2011) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa apabila DAU mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan tingkat alokasi belanja modal mengalami penurunan. Sebaliknya pula, apabila DAU mengalami penurunan maka tingkat alokasi belanja modal daerah justru meningkat. Dalam penelitiannya Nurlis (2016) dan Yovita (2011) menyatakan bahwa, "Hal ini dapat terjadi karena DAU lebih banyak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya". Hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung menggunakan DAU untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dibandingkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Contohnya pada Kabupaten Pekalongan realisasi DAU tahun 2015 sebesar 862.011.706.000 sedangkan alokasi belanja modal tahun 2015 sebesar 0,133 dan realisasi DAU tahun 2016 sebesar 926.571.243.000 sedangkan alokasi belanja modal tahun 2016 sebesar 0,160. Pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan pada angka realisasi DAU menjadi 910.294.366.000, namun alokasi belanja modal di tahun yang sama mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,202.

Hipotesis 4

Hipotesis keempat penelitian adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar $6,838E-14$ dan nilai signifikansi sebesar 0,044. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, yang artinya hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rochmatullah dkk. (2016) dimana pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dalam penelitiannya Rochmatullah dkk. (2016) menyatakan bahwa, "Semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi juga pendapatan yang dialokasikan untuk belanja modal". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari besarnya PAD mampu meningkatkan alokasi belanja modal Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Adanya pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal ini disebabkan karena sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengandalkan PAD yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua pembiayaan dan belanja daerah terutama belanja modal. Contohnya pada Kota Semarang realisasi PAD di tahun 2015 sebesar 1.201.581.778.459 dengan tingkat alokasi belanja modal tahun 2015 sebesar 0,227. Lalu terdapat peningkatan pada realisasi PAD di tahun 2016 sebesar 1.491.645.900.065 yang diikuti dengan meningkatnya juga alokasi belanja modal tahun 2016 sebesar 0,261. Begitu pula di tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan pada angka realisasi PAD di Kota Semarang sebesar 1.791.874.833.769 dan alokasi belanja modal menjadi sebesar 0,295.

Hipotesis 5

Hipotesis kelima penelitian adalah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai koefisien beta sebesar $-0,100$ dan nilai signifikansi sebesar 0,128. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dan memiliki arah hubungan negatif, yang artinya hipotesis ini ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Huda dkk. (2015) dimana rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan yang negatif. Dalam penelitiannya Huda dkk. (2015) menyatakan bahwa, "Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dikarenakan kontribusi dari PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan dana bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman". Nilai rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2015-2017 adalah sebesar 0,223 atau 22,3%, yang artinya Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki kemampuan keuangan daerah yang masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan yang instruktif atau belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial karena peran pemerintah pusat lebih dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat/provinsi dan pihak eksternal itu masih tinggi sehingga mengakibatkan belum mampunya daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Contohnya pada Kota Tegal angka rasio kemandirian tahun 2015 sebesar 0,400 sedangkan alokasi belanja modal tahun 2015 sebesar 0,216. Rasio kemandirian di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,380 sedangkan alokasi belanja modal tahun 2016 meningkat menjadi 0,231 dan di tahun 2017 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 0,430 sedangkan alokasi belanja modal di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,202.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan regional perkapita, produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017 yang ditentukan dengan metode sensus. Setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi hasil uji statistik atas seluruh variabel penelitian, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan regional perkapita dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan positif, yang artinya penelitian ini mendukung H1 dan H4.
2. Produk domestik regional bruto (PDRB) dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif, yang artinya penelitian ini tidak mendukung H2 dan H5.
3. Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif, yang artinya penelitian ini tidak mendukung H3.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, variabel independen yang terdapat dalam model penelitian ini berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sebesar 13,5%. Sedangkan, sebesar 86,5% sisanya masih bisa dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. *Kedua*, penelitian ini berfokus pada faktor kuantitatif atas pengaruh komponen keuangan, sehingga belum dapat diketahui faktor kualitatif yang mampu mempengaruhi alokasi belanja modal pemerintah daerah. *Ketiga*, penulis belum mampu mendapatkan data pendukung berupa berapa besarkah muatan politis yang terkandung pada saat penetapan APBD oleh DPRD.

Dalam upaya mewujudkan penelitian selanjutnya yang lebih baik, atas dasar keterbatasan tersebut disarankan agar menambah variabel lain diluar penelitian yang diperkirakan dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti DAK, DBH, transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah provinsi, lain-lain pendapatan yang sah, serta unsur-unsur dari pembiayaan. Selain itu, menganalisis pula pengaruh dari faktor-faktor lain yang bersifat kualitatif, seperti kebijakan pemerintah, kondisi geografis, kondisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mencari data pendukung berupa besaran muatan politis yang terkandung pada saat penetapan APBD oleh DPRD.

REFERENSI

- Bank Indonesia. 2015. Produk Domestik Regional Bruto.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.
- DJPK. 2017. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJPK RI. 2017. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian RI : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Fitri, V. K., Rasuli, M., & Silfi, A. 2013. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2009-2012.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21. In Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.
- Hadi, W. 2010. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh).
- Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Harianto, D., & Hari Adi, P. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.
- Herawaty, N. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Universitas Brawijaya, Malang.
- Huda, A. S., Herwanti, R. T., & Pancawati, R. S. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Nusa Tenggara Barat.
- Indarti, I., & Sugiartiana. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009.
- Intan Prihandani, N. M. 2015. Pengaruh Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran di Universitas Udayana dengan Informasi Asimetri dan Motivasi sebagai Pemoderasi.
- Jayanti, I. P., Sjamsuddin, S., & Wachid, A. 2014. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Pemerintah Kota Malang).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. 2013. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Meilya, R., Akram, & Herwanti, T. 2018. Fiscal Illusion and Defining Factors of Capital Expenditure (Study on Undeveloped Areas in West Nusa Tenggara), Vol. 8, No. 1, h. 98-106.
- Nurlis. 2016. The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government of Indonesia. Vol. 7, No. 1, h. 107-113.
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Vol. 2, No. 1, h. 1-211.
- Permendagri No. 13. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- PP No. 71. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. 2016. Determinating the Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 17, No. 2.
- RPJM. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Buku I Agenda Pembangunan Nasional.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kab./Kota di Jawa Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yovita, F. M. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008 – 2010).